

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Tesis



Diajukan Oleh

JAYANTI MANDASARI

152303112

Kepada

MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2018

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 Program
Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh

JAYANTI MANDASARI

152303112

Kepada

MAGISTER MANAGEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Februari 2018

Jayanti Mandasari

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karya kecil ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku, Ibu Salma dan Bapak Imran tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi nasehat dan telah memberiku support baik moril maupun material, terima kasih untuk semuanya.
- ❖ Kedua kakak cantikku tersayang terima kasih atas dukungan, doa dan semangatnya selama ini.
- ❖ Pimpinan dan rekan karyawan PT. Citra Guna Perkasa
- ❖ Sahabat-sahabatku sayang, thank's for all.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang begitu besar tak lupa sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL”** ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Imran dan Ibu Salma yang selalu mencurahkan perhatian, cinta dan sayang, dukungan serta doa tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. John Suprihanto, MIM selaku direktur pengelola Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Bapak Suhartono, S.E. M.Si selaku asisten direktur pengelola Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak dan Bapak Zulkifli, S.E, MM selaku Dosen Pembimbing Tesis, telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas semua waktu dan ilmu yang telah bapak berikan selama ini.
5. Bapak Jazuli dan Bapak Zulkifli, S.E, MM selaku penguji tesis yang telah memberikan nasihat, masukan dan bimbingan yang baik.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, mendidik dan mentransfer ilmunya kepada penulis selama kuliah di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
7. Seluruh karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta yang secara tidak langsung ikut menunjang kelancaran study penulis.
8. Perpustakaan kampus STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang membantu dalam mencari referensi dalam penyelesaian tesis ini.
9. Keluarga besar yang di Sumbawa Barat terima kasih atas doa dan semangatnya.
10. Sahabat-sahabat dan rekan kerja yang selalu setia memberikan saran dan kritikan.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan baik.
12. Karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah membantu dalam pengumpulan data.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Itu semua dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih penulis hanya bisa berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta almamater Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Yogyakarta, Februari 2018

Jayanti Mandasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	16
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN	16
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	17
1.5 MANFAAT PENELITIAN	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
2.1 PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH.....	19
2.2 AKUNTABILITAS PUBLIK	20
2.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SKPD	22
2.4 NPM (<i>New Public Management</i>)	25
2.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010	27
2.6 TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.7 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	31
BAB III METODA PENELITIAN	34
3.1 DESAIN PENELITIAN	34
3.2 POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL.....	34
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA.....	35
3.4 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURANNYA.....	36
3.4.1 VARIABEL DEPENDEN.....	36
3.4.2 VARIABEL INDEPENDEN.....	36

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Data.....	37
3.5.1 Uji Validitas Data.....	37
3.5.2 Uji Reliabilitas Data.....	38
3.6 Pengujian Hipotesis.....	38
3.6.1 Analisis Regresi Berganda.....	38
3.6.2 Uji Normalitas.....	39
3.6.3 Uji Linieritas.....	39
3.6.4 Uji Multikolinieritas.....	40
3.6.5 Uji Homogenitas.....	40
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	42
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	42
4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	44
4.2.1 Uji Validitas X1.....	45
4.2.2 Uji Reliabilitas X1.....	45
4.2.3 Uji Validitas X2.....	46
4.2.4 Uji Reliabilitas X2.....	47
4.2.5 Uji Validitas Y.....	48
4.2.6 Uji Reliabilitas Y.....	49
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.1 Uji Normalitas.....	50
4.3.2 Uji Linieritas.....	51
4.3.3 Uji Multikolinieritas.....	52
4.3.4 Uji Homogenitas.....	53
4.4 Pengujian Hipotesis.....	54
4.4.1 Analisis Regresi Berganda.....	54
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1 KOMPOSISI RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN	41
TABEL 4.2 KOMPOSISI RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR	42
TABEL 4.3 KOMPOSISI RESPONDEN BERDASARKAN MASA KERJA	42
TABEL 4.4 UJI VAIDITAS X1	45
TABEL 4.5 UJI RELIABILITAS X1	45
TABEL 4.6 RELIABILITAS STATISTIC X1	45
TABEL 4.7 ITEM-TOTAL STATISTCS X1	46
TABEL 4.8 UJI VALIDITAS X2	46
TABEL 4.9 UJI RELIABILITAS X2	47
TABEL 4.10 RELIABILITAS STATISTICS X2	47
TABEL 4.11 ITEM-TOTAL STATISTCS X2	47
TABEL 4.12 UJI VALIDITAS Y	48
TABEL 4.13 UJI RELIABILITAS Y	49
TABEL 4.14 RELIABILITAS STATISTIC Y	49
TABEL 4.15 ITEM-TOTAL STATISTCS Y	49
TABEL 4.16 UJI DISTRIBUSI NORMAL	50
TABEL 4.17 HASIL PENGUJIAN UJI LINIERITAS ANTARA PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN STAF	51
TABEL 4.18 HASIL PENGUJIAN UJI LINIERITAS ANTARA PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL DENGAN PENGALAMAN MENJALANKAN BASIS KAS TO AKRUAL	52
TABEL 4.19 UJI MULTIKOLINIERITAS	52
TABEL 4.20 UJI HOMOGENITAS	53
TABEL 4.21 UJI HETEROKEDAKTISITAS	53
TABEL 4.22 ANALISIS REGRESI BERGANDA	54
TABEL 4.23 MODEL SUMMARY	54
TABEL 4.24 ANNOVA	55
TABEL 4.25 COEFFICIENTS	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	LEMBAR PERTANYAAN KUISIONER PENELITIAN
LAMPIRAN II	TABEL HASIL DATA RESPONDEN
LAMPIRAN III	SURAT IJIN PENELITIAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Abstrak

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan suatu standar pemerintahan yang mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah. Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk : 1. Menganalisis pengaruh antara tingkat pendidikan staf keuangan terhadap penerapan akuntansi akrual. 2. Menganalisis pengaruh pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terhadap penerapan akuntansi akrual.

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan (X1) dan pengalaman menjalankan basis kas menuju Akrual (X2) terhadap penerapan Akuntansi Akrual (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : a) Tingkat pendidikan staf keuangan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan staf sebesar 59,3% dapat dijelaskan. b) Hasil Analisis pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya pengalaman menjalankan basis kas (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y).

Kata kunci : Kesiapan Pemerintah, Akrual Basis, PP Nomor 71 Tahun 2010.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Kerangka Konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintahan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan (Abdul Hafiz Tanjung 2015 : 2).

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya (SAP, Kerangka Konseptual, paragraf 21).

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan bertujuan umum (SAP, Kerangka Konseptual, paragraf 22).

Pasca reformasi tahun 1998, tuntutan adanya pemerintahan efektif yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang baik terus bergulir. Dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, revisinya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan revisi terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 dan revisinya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan wujud

keseriusan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang sentralis menuju tatanan pemerintahan yang terdesentralisasi serta manajemen keuangan yang lebih baik.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, akan terjadi proses pemberdayaan, kemampuan, prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu, sehingga kemampuan mengatasi berbagai masalah ekonomi daerah akan semakin kuat (Halim dan Kusufi, 2016)

Reformasi pemerintahan tersebut mengarahkan pemerintah untuk lebih bertanggungjawab kepada publik atas program yang mereka kerjakan dan penggunaan dana publik atas program tersebut. Akuntabilitas publik diharapkan mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan akut pemerintahan.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik terus digalakkan seiring dikeluarkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah direvisi dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan revisi terakhir Permendagri No. 59 Tahun 2007. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan

Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan PP Nomor 105 Tahun 2000 (Halim dan Kusufi 2016 : 262).

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan *good governance* ditunjukkan kembali dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Setelah itu dikeluarkan pula UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (Halim dan Kusufi 2016 : 262).

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah

pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrasi governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo 2002 : 17).

Meningkatnya peran daerah dalam pengelolaan keuangan, tuntutan untuk lebih mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara horizontal dan vertikal semakin tinggi. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo 2002 : 21).

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

Akuntabilitas pemerintah terwujud dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik sebagai bahan referensi bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Signifikansi peran akuntansi sektor publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, semakin nyata dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang kemudian

direvisi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur SAP Berbasis Akrua. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Sementara pada PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan *New Public Management*.

Model *New Public Management* (NPM) mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi. *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* (NPM) tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen sektor publik. Oleh karena itu, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.

Munculnya konsep *New Public Management* berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya

perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual.

Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan prospek kinerja.

Penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik *New Public Management* (NPM) lain dalam organisasi sektor publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua manfaat, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya.

Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara). Salah satu ketentuan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. Dalam salah satu penjelasan di undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.

Perjalanan panjang penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sosial politik yang memengaruhi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem politik dan pemerintahan tersebut berdampak pada perubahan aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntansinya, karena penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan (Halim dan Kusufi 2016 : 197).

Akuntansi sektor publik berbeda secara luas dengan akuntansi sektor privat. Hal ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik lingkungan organisasional di antara keduanya. Organisasi sektor publik memiliki tujuan karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan yang khas dan membedakannya dengan sektor privat.

Tujuan organisasi sektor publik memengaruhi misi, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar organisasi

sektor publik. Terutama entitas pemerintahan, adalah tujuan organisasi yang lebih menekankan pencapaian kinerja nonkeuangan dibandingkan pencapaian kinerja keuangan karena organisasi sektor publik tidak berorientasi kepada laba. Kinerja nonkeuangan yang ingin dicapai oleh organisasi sektor publik sering kali juga bersifat kualitatif sehingga sulit untuk menentukan ukuran kinerja secara andal. Pada sektor bisnis/swasta tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, sedangkan pada organisasi sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, penegakkan hukum, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik seperti kebutuhan bahan pokok masyarakat (Halim dan Kusufi 2016 : 12-13).

Karakteristik organisai publik yang multifungsional dikarenakan organisasi publik bergerak dalam berbagai wilayah yang meliputi lingkungan ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Atas kompleksitas dan kerumitan struktur organisasi dalam sektor publik dibutuhkan sebuah mekanisme pengelolaan yang terkoordinasi untuk mengontrol pencapaian tujuan dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Hal ini berbeda dengan sektor privat yang memungkinkan struktur organisasi yang fleksibel.

Struktur organisasi berkaitan erat dengan fungsi, strategi, dan tujuan organisasi. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada organisasi. Hal ini terkait dengan budaya organisasional. Budaya organisasional berkaitan dengan norma-norma informal dan nilai yang berkembang dan menjadi penting untuk

kegiatan organisasi. Nilai merupakan panduan normatif untuk sikap dan tindakan yang tepat. Nilai memberikan kerangka moral untuk tujuan dan nilai-nilai aktivitas (Halim dan Kusufi 2016 : 14).

Wacana tentang *good governance* pada organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan *good government governance* merupakan isu yang paling mengemuka pada era reformasi sampai dengan sekarang ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan dengan transparan dan akuntabel sejalan dengan keinginan masyarakat internasional. Salah satu kunci pengembangan di dalam tata kelola sektor publik selama lebih dari 15 tahun adalah adanya dorongan yang kuat oleh lembaga-lembaga internasional, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), *the International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank*, kepada negara-negara di dunia untuk mengganti sistem akuntansi tradisionalnya dari akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual seperti pada sektor swasta. Tuntutan dari masyarakat internasional tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Dasar akuntansi merupakan metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam menentukan kapan dan bagaimana mencatat transaksi ekonomi. Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (*timing*) kapan transaksi ekonomi ke dalam akun. Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui/dicatat sampai transaksi tersebut secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, kenyataannya suatu transaksi belum tentu berpengaruh terhadap kas (Halim dan Kusufi 2016 : 196).

Penerapan dasar akuntansi ini dianggap banyak kelemahan, terutama laporan keuangan yang dihasilkan tidak informatif. Laporan pertanggungjawaban yang tidak informatif tentunya akan mengganggu terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi berbasis kas secara penuh dianggap sudah tidak relevan lagi dengan semangat menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya (Halim dan Kusufi, 2012). Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi sektor publik. Para pendukung penerapan basis akrual dalam organisasi sektor publik, meyakini bahwa akuntansi akrual mengakui beban ketika transaksi tersebut terjadi, dianggap menyediakan gambaran operasional pemerintah secara lebih transparan (Boothe, 2007).

Sistem akuntansi kas relatif sederhana, maka relatif mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Kelebihannya juga relatif mudah dalam audit dan pengendaliannya. Sistem ini cakupannya hanya terbatas pada transaksi yang menghasilkan pembayaran atau penerimaan kas dan sistem ini hanya mempertimbangkan transaksi yang terjadi pada periode akuntansi yang relevan. Sedangkan sistem akuntansi akrual relatif rumit untuk diimplementasikan dan dijalankan dan keharusan untuk melakukan audit dan pengendalian. Meskipun demikian, kelebihannya adalah mencakup pencatatan transaksi nonkas sebaik

transaksi kas dan mengakui pengaruh di masa mendatang (*future effect*) dari transaksi dan perubahan kebijakan.

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara *proprietary fund (full accrual)* karena biaya (*expense*) diukur dalam *proprietary fund*, sedangkan *expenditure* difokusnya pada *general fund*. *Expenditure* adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena *governmental fund* tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), *expenditure* yang diukur, bukan *expense*.

Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*proper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*) (Mardiasmo 2002 : 154-155).

Pemerintah diminta untuk efisien dan efektif. Ini berarti bahwa harus ada penekanan pada pengendalian strategis dari pengeluaran agregat dan pengaturan prioritas dan fasilitasi efisiensi dan efektivitas melalui pendelegasian wewenang manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil. Untuk mencapai itu, para pembuat keputusan disemua tingkatan di sektor publik membutuhkan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat. Hal ini pada gilirannya, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan radikal dalam sistem administrasi publik.

Akuntansi sebagai sistem informasi memegang peranan penting dalam proses reformasi pada tiap entitas pemerintah. Jadi, dari akuntansi kas ke arah akuntansi akrual merupakan langkah penting dalam pengembangan akuntansi pemerintah dan sistem anggaran. Pemerintah harus positif dan terbuka kepada masyarakat dengan tidak membatasi jumlah informasi yang mengungkapkan tentang kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan usaha seperti sistem pelaporan dalam sektor publik. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan kontribusi menuju lebih transparan dan informatifnya penggunaan dana publik dan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini sistem akuntansi pemerintah harus mampu memberikan informasi yang tepat untuk proses pengambilan keputusan.

Perubahan radikal di sektor publik merupakan konsekuensi dari beberapa alasan. Tantangan yang timbul dari integrasi ekonomi global adalah salah satu alasan penting yang mendasari perubahan-perubahan radikal. Globalisasi memberikan tekanan besar pada pemerintah untuk melakukan perubahan

mendasar pada sistem administrasi, mempercepat reformasi perusahaan, dan membuka sistem keuangan untuk kompetisi asing (Halim dan Kusufi, 2016).

Globalisasi menuntut organisasi sektor publik lebih responsif terhadap lingkungan kompetitif. Hal ini juga menuntut agar pemerintah dan badan-badan publik menyelaraskan tujuan mereka. Harmonisasi dapat menjamin bahwa pembangunan ekonomi tidak tertahan dan justru memberikan stimulus bagi peningkatan standar hidup. Singkatnya, integrasi cepat dari perekonomian dunia melalui peningkatan perdagangan dan investasi (integrasi yang telah didorong oleh teknologi baru, penyebaran informasi dan semakin pentingnya industri berbasis pengetahuan) memberikan potensi untuk membuka era baru untuk pembangunan manusia.

Pada era reformasi keuangan daerah, mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi : (1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Pada penelitian sebelumnya (Hetti Herlina, 2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitiannya adalah PP 71 Tahun 2010, yang membahas tentang perubahan sistem akuntansi dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP 24 tahun 2005) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual penuh (PP 71 tahun 2010). Penelitian terdahulu tidak membahas sistem akuntansi, karena yang diteliti adalah faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda bukan kesiapan sistem akuntansi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Pemda di Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP No 71 Tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku, dan faktor keterampilan.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih mengalami beberapa kendala dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti dalam penilaian asset/aktiva yang dimiliki, semua aktiva yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus dapat dinilai secara material sementara setiap Dinas/Badan memiliki asset (aktiva) yang berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang tidak sebentar. Bila dilihat dari latarbelakang pendidikan, tidak semua karyawan bagian Keuangan memiliki latarbelakang pendidikan khususnya Akuntansi sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian, pelatihan dan pemahaman terhadap aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji sampai sejauh mana penerapan akuntansi akrual dan menguji pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, organisasional dan situasional terhadap penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Penelitian terhadap akuntansi akrual pada tingkat satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi sistem akuntansi akrual pada pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Analisis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Tingkat pendidikan staf dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI dalam penerapan akuntansi akruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum optimal”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akruaI?
2. Apakah pengalaman menjalankan akuntansi basis kas menuju akruaI berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akruaI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh antara tingkat pendidikan staf keuangan terhadap penerapan akuntansi akruaI.
2. Menganalisis pengaruh antara pengalaman menjalankan basis kas menuju akruaI terhadap penerapan akuntansi akruaI.

1.5 Manfaat Penelitian

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris dari tingkat keberhasilan dalam menerapkan sistem akuntansi akrual dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman kepada para peneliti dan para pimpinan mengenai proses implementasi dan tantangan reformasi, membantu memperbaiki model dan meningkatkan sistem yang efektif dalam proses implementasi dan proses tender-tender di masa depan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah : 1995). Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Salah satu tujuan tata buku atau akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Akuntansi keuangan daerah berhubungan dengan (pengurusan) keuangan negara. Hubungan tersebut terlihat dari struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang memiliki pos Sumbangan dan Bantuan (prareformasi) dan Dana Perimbangan (pasca reformasi). Keuangan negara adalah semua hak, kewajiban, dan milik negara yang dapat dinilai dengan uang. Ruang lingkup keuangan negara terdiri atas APBN dan barang inventaris negara yang dikelola langsung oleh negara dan BUMN yang pengelolaannya dipisahkan.

2.2 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Elwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

(*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*) dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja.

Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode, dan catatan tersebut, PPK SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan. Pada tingkat pemerintah daerah, satuan kerja yang bertanggungjawab menyelenggarakan akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), satuan kerja ini berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau pada banyak pemerintah daerah berupa Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau sekarang di kenal dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Pada SKPKD transaksi-transaksi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu: transaksi-transaksi sebagai satuan kerja dan transaksi-transaksi tersebut SKPKD menyusun laporan keuangan sebagai kantor pusat (*home office*). Pada akhir tahun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan laporan

keuangan dari setiap SKPD dengan laporan keuangan SKPKD yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi akuntansi SKPKD.

2.3 Komponen Laporan Keuangan SKPD

Dalam kerangka konseptual paragraf 28 standar akuntansi pemerintahan menjelaskan komponen laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Khusus pada SKPD, dari 7 laporan keuangan wajib dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SKPD hanya menyusun laporan keuangan sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013) :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD (PSAP BA 01 paragraf 35). Selanjutnya dalam paragraf 37 menyatakan

lebih lanjut bahwa LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur :

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit-LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Dalam penyajian LRA baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada SKPD, LRA tersebut harus menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan (PSAP BA 01 paragraf 38). Selanjutnya dalam PSAP BA 02 paragraf 9 menyatakan bahwa dalam LRA harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi: nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.

b. Neraca

Dalam PSAP BA 01 paragraf 44 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada

tanggal tertentu. Dalam neraca SKPD, aset yang disajikan adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan investasi jangka panjang dan dana cadangan tidak disajikan dalam neraca SKPD. Hal ini disebabkan investasi jangka panjang dan dana cadangan merupakan aset-aset yang disajikan pada tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini pada neraca SKPKD. Begitu juga untuk kewajiban, yang disajikan hanya kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang tidak disajikan dalam neraca SKPD. Kewajiban jangka panjang disajikan pada neraca SKPD.

c. Laporan Operasional (LO)

Manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. PSAP BA 12 paragraf 7 menyatakan laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan.

2.4 NPM (*New Public Management*)

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam

manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan *New Public Management*.

Model *New Public Management*) mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya munculnya konsep “*managerialism*” (Pollit, 1993); “*market-based public administration*” (Lan, Zhiyoung, and Rosenbloom, 1992). *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi,, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era *New Public Management* adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “*reinventing government*”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :

1. Pemerintahan katalis
2. Pemerintahan milik masyarakat
3. Pemerintah yang kompetitif
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi
5. Pemerintah yang berorientasi hasil
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan

7. Pemerintah wirausaha
8. Pemerintah antisipatif
9. Pemerintah desentralisasi
10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas menuju AkruaI dapat berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis Kas menuju AkruaI, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis AkruaI.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akruaI menjadi akruaI, PP Nomor 71 Tahun 2010 mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.6 Tinjauan Pustaka

2.2.1. Penelitian yang dilakukan oleh Hetti Herlina Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2013 yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP No 71 Tahun 2010*”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintahan Daerah Kab. Nias Selatan dalam implementasi PP 71 tahun 2010. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan studi kasus, hasil analisis data menunjukkan bahwa kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan.

2.2.2. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Najati, Endar Pituringsih, dan Animah Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram yang berjudul “*Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua : Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga*”. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrua. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurna penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Temuan lain adalah pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrua. Semakin baik dan semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrua.

Budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Budaya *siri' na pacce* yang dijunjung tinggi mampu mendorong operator aplikasi SAIBA untuk menerima dan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Semakin kuat budaya organisasi akan semakin mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. Implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas LKKL. Hal ini disebabkan karena dengan basis akrual, informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas LKKL yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin meningkatkan kualitas LKKL.

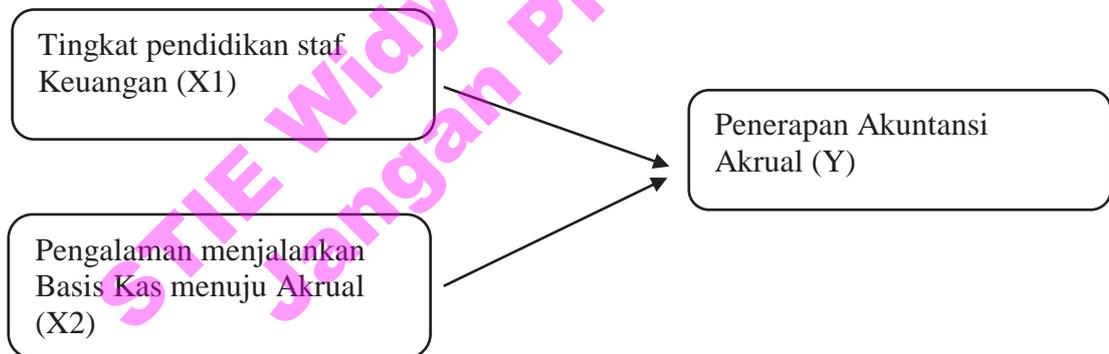
2.2.3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Dimas Satrio Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, Indrawati Yuhertiana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, dan Ardi Hamzah Universitas Trunodjoyo, Bangkalan, Madura yang berjudul *“Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang”*.

Penelitian ini membahas tentang implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam aspek komitmen, regulasi dan kebijakan, pengelolaan SDM dan pengelolaan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD. Data dianalisis menggunakan pendekatan interpretif yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pimpinan beserta jajaran SKPD memiliki komitmen dalam implementasi SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan juga telah dibuat, disosialisasikan dan diimplementasikan. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan SKPD. Sedangkan dalam pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Jombang telah bekerja sama dengan BPKP dalam penyediaan aplikasi keuangan SIMDA. Namun dari ketiga aspek tersebut masih terdapat kendala-kendala yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang.

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Perumusan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam bentuk diagram skematik sebagai berikut:



Berdasarkan uraian diatas, dikembangkan hipotesis berdasarkan faktor-faktor pada satuan kerja yang diduga memiliki pengaruh pada penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah tingkat satuan kerja, yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Terhadap Penerapan Akuntansi Akrua

Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Muzahid, 2014). Penyampaian laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel masih sulit diterapkan bagi aparatur daerah, tepat waktu, dan disusun sesuai SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra dalam Kusuma, 2009), maka dari itu latar belakang pendidikan staf keuangan termasuk dalam peran utama dalam penerapan sistem akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan kepatuhan akuntansi. Tingkat pendidikan staf keuangan (X1) Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrua (X2) Implementasi Akuntansi Akrua (Y). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), pendidikan staf keuangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat penerapan akrua.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penelitian ini dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrua.

b. Pengalaman Sebelumnya Dalam Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Penerapan sistem akuntansi akrual diterapkan secara bertahap, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual harus segera diterapkan oleh setiap entitas. Namun, bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual dapat menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual hingga batas waktu penerapan basis akrual secara penuh, yaitu tahun 2015. Satuan kerja dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru.

Menurut Christiaens, (1999) organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik. Penelitian sebelumnya oleh Stamatiadis, et al (2009) memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan Skala *Likert*, skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Kuncoro dan Riduwan, 2013:37). Nazir (2004) mengatakan bahwa, “Populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya. “ Nawawi (2003) menyebutkan bahwa, “Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap”. Populasi dalam penelitian ini adalah BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Arikunto (2003) mengatakan “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. “ Sugiyono (2004) memberikan pengertian: “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai di bidang akuntansi/keuangan di masing-masing unit SKPD. Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu dengan menggunakan kuisisioner. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Pegawai SKPD pada Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Bantul.
2. Pegawai SKPD yang bekerja pada bidang akuntansi/keuangan pada Badan dan Dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD di bidang keuangan/akuntansi pada dinas atau badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) definisi Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Indikator variabel diukur dari kemampuan pengetahuan berhubungan dengan akuntansi dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5, yaitu: 1. STS (sangat tidak setuju), 2. TS (tidak setuju), 3. KS (kurang setuju), 4. S (setuju), 5. SS (sangat setuju), yang memungkinkan penulis untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen (X) penelitian ini adalah tingkat pendidikan staf, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

3.5.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya. Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menghitung korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan cara menggunakan teknik korelasi *Person Produk Moment (PPM)*.

Rumus *Person Produk Moment (PPM)* adalah sebagai berikut (Akdon 2013 : 62).

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

R_{xy} = Koefisien Korelasi

N = Jumlah Sampel

X = Skor Variabel Independent

Y = Skor Variabel Dependen

3.5.2 Uji Reliabilitas Data

Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang adalah konsisten atau stabil terhadap waktu ke waktu. Variabel di katakan reliabel jika *cronbach alpha* > 0,70. Uji reliabel dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap konsistensi pertanyaan.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisa Regresi Berganda

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan (memprediksi) variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka ditransformasikan ke dalam persamaan regresi berganda:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Penerapan Akuntansi Akrua

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X¹ = Tingkat Pendidikan Staff

X² = Pengalaman menjalankan Basis Kas ke Akrua basis

e = Error

Jika nilai koefisien β_1 , β_2 lebih kecil dari ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima dan jika nilai koefisien β_1 , β_2 lebih besar dari ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak.

3.6.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05.

3.6.3 Uji Linieritas

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas akan menentukan teknik-teknik analisa yang akan digunakan bisa digunakan atau tidak. Apabila dari hasil uji linieritas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linier maka data penelitian dapat digunakan dengan metoda-metoda yang ditentukan (misalnya analisa regresi linier). Demikian juga sebaliknya apabila ternyata tidak linier maka distribusi data harus dianalisis dengan metoda lain.

Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Pada uji linieritas yang diharapkan adalah harga F empiric yang lebih kecil dari F teoritik, yang berarti bahwa dalam distribusi data yang diteliti memiliki bentuk yang

linier, dan apabila F empiric lebih besar dari F teoritiknya maka berarti distribusi data yang diteliti adalah tidak linier.

3.6.4 Uji Multikolinieritas

Secara konsep, multikolinieritas adalah situasi dimana terdapat dua variabel yang saling berkorelasi. Adanya hubungan diantara variabel bebas adalah hal yang tak bisa dihindari dan memang diperlukan agar regresi yang diperoleh bersifat valid. Namun, hubungan yang bersifat linier harus dihindari karena akan menimbulkan gagal estimasi (multikolinieritas sempurna) atau sulit dalam inferensi (multikolinieritas tidak sempurna). Variabel dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10.

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara hubungan yang sempurna antara variable-variabel independen. Jika didalam pengujian ternyata didapatkan sebuah kesimpulan bahwa antara variable independent tersebut saling terikat, maka pengujian tidak dapat dilakukan kedalam tahapan selanjutnya yang disebabkan oleh tidak dapat ditentukannya koefisien regresi variabel tersebut tidak dapat ditentukan dan juga nilai standard errornya menjadi tak terhingga.

3.6.5 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat

dalam analisis *independent sample t test* dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan penelitian diperoleh data yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan karakteristik responden yaitu karyawan atau pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Bantul. Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden, diperoleh informasi data identitas dan latar belakang dari responden. Penyajian data mengenai identitas responden disini, yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan data individu dari responden, yang meliputi jenis kelamin, masa kerja dan pendidikan terakhir, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	19	63,333 %
2	Perempuan	11	36,666 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan jenis kelamin responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul sebagian besar adalah kelompok berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 responden (63,333%) dan sebanyak 11 responden (36,666%) pada kelompok berjenis kelamin perempuan.

b. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir

Tabel 4.2

No	Tingkat Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
1	SMA	5	16,667 %
2	STRATA 1 (S1)	18	60,00 %
3	STRATA 2 (S2)	7	23,334 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan tingkat pendidikan akhir responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul sebagian besar adalah lulusan Sarjana Stata 1 (S1) yaitu sebanyak 18 responden (60,00 %), lulusan strata 2 (S2) sebanyak 7 responden (23,334%) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 responden (16,667%).

c. Komposisi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 4.3

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	>5 Tahun	8	26,666 %
2	>10 Tahun	3	10,00 %
3	>15 Tahun	7	23,334 %
4	>20 Tahun	12	40,00 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan masa kerja responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul adalah sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 12 responden (40,00 %), masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 7 responden (23,334%), masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 responden (10,00%) dan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 8 responden (26,667%).

4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan dari angket yang dipergunakan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuisisioner dikatakan valid (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden atas pertanyaan pada setiap variabel selalu konsisten dari waktu ke waktu. Untuk hasil lengkap dari uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

4.2.1 Uji Validitas X1

Tabel 4.4
Correlations

Total_X1	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
X1.1	.695**	.000	30
X1.2	.723**	.000	30
X1.3	.781**	.000	30
X1.4	.756**	.000	30
X1.5	.738**	.000	30
X1.6	.563**	.001	30
Total_X1	1		30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X1 telah lolos uji validitas.

4.2.2 Uji Reliabilitas X1

Scale: ALL VARIABLES

Tabel 4.5
Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.6
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	6

Tabel 4.7
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	18.6000	11.903	.532	.781
X1.2	18.3333	11.885	.581	.769
X1.3	18.3333	10.989	.643	.754
X1.4	18.1333	11.637	.626	.759
X1.5	18.1000	11.817	.603	.765
X1.6	18.0000	13.241	.386	.810

Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

4.2.3 Uji Validitas X2

Tabel 4.8
Correlations

Total_X2	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
X2.1	.508**	.004	30
X2.2	.544**	.002	30
X2.3	.777**	.000	30
X2.4	.735**	.000	30
X2.5	.526**	.003	30
X2.6	.543**	.002	30
X2.7	.651**	.000	30
X2.8	.582**	.001	30
X2.9	.616**	.000	30
X2.10	.634**	.000	30
X2.11	.615**	.000	30
X2.12	.507**	.004	30
X2.13	.460*	.010	30
Total_X2	1		30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X2 telah lolos uji validitas.

4.2.4 Uji Reliabilitas X2

Scale: ALL VARIABLES

Tabel 4.9
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.10
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.844	13

Tabel 4.11
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	43.0667	39.789	.398	.840
X2.2	42.9000	39.128	.434	.837
X2.3	42.9667	37.206	.720	.818
X2.4	43.0333	36.171	.653	.821
X2.5	43.0333	39.551	.419	.838
X2.6	42.8667	39.154	.434	.837
X2.7	42.8667	38.947	.577	.828
X2.8	42.7333	38.823	.481	.834
X2.9	42.8667	38.740	.527	.831
X2.10	43.0333	39.413	.563	.830
X2.11	42.8333	38.282	.518	.831
X2.12	42.6333	39.895	.401	.839
X2.13	42.7667	40.806	.359	.841

Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

4.2.5 Uji Validitas Y

Tabel 4.12
Correlations

Total_Y	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N
Y.1	.728**	.000	30
Y.2	.710**	.000	30
Y.3	.521**	.003	30
Y.4	.595**	.001	30
Y.5	.569**	.001	30
Y.6	.410*	.024	30
Y.7	.566**	.001	30
Y.8	.643**	.000	30
Y.9	.522**	.003	30
Y.10	.535**	.002	30
Y.11	.541**	.002	30
Y.12	.539**	.002	30
Y.13	.476**	.008	30
Y.14	.612**	.000	30
Total_Y	1		30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel Y telah lolos uji validitas.

4.2.6 Uji Reliabilitas Y

Scale: ALL VARIABLES

Tabel 4.13
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Table 4.14
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	14

Tabel 4.15
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	49.8667	41.637	.673	.812
Y.2	49.8333	40.764	.642	.811
Y.3	49.7000	42.976	.424	.825
Y.4	49.7000	41.597	.498	.820
Y.5	49.6667	40.989	.448	.825
Y.6	49.7000	43.459	.271	.838
Y.7	49.6667	41.609	.457	.823
Y.8	49.5333	41.223	.558	.816
Y.9	49.2667	43.375	.434	.825
Y.10	49.5333	43.568	.455	.824
Y.11	49.7000	42.286	.437	.825
Y.12	50.0000	43.172	.453	.824
Y.13	49.7667	44.047	.387	.827
Y.14	49.5667	41.013	.512	.819

Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tingkat Pendidikan Staf	Pengalaman Menjalankan Basis Kas to Akrual	Penerapan Akuntansi Akrual
N		30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.6500	3.5744	3.8214
	Std. Deviation	.67714	.51650	.49691
Most Extreme Differences	Absolute	.210	.157	.171
	Positive	.156	.133	.075
	Negative	-.210	-.157	-.171
Kolmogorov-Smirnov Z		1.149	.860	.939
Asymp. Sig. (2-tailed)		.142	.451	.342

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai Asymp. Sig yang lebih besar dari

0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Linieritas

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas akan menentukan teknik-teknik analisa yang akan digunakan bisa digunakan atau tidak. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut :

Tabel 4.17
Hasil pengujian Uji Linieritas antara Penerapan Akuntansi Akrual dengan
Tingkat Pendidikan Staf
ANOVA Table

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)	4.460	11	.405	2.703	.030
Between Groups	1.822	1	1.822	12.147	.003
Penerapan Akuntansi Akrual * Tingkat Pendidikan Staf	2.638	10	.264	1.758	.143
Within Groups	2.700	18	.150		
Total	7.161	29			

Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig F pada deviation from linierity $0,143 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan akuntansi akrual dengan tingkat pendidikan staf bersifat linier.

Tabel 4.18
Hasil Pengujian Uji Linieritas antara Penerapan Akuntansi Akruwal dengan
Pengalaman Menjalankan Basis Kas to Akruwal

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Penerapan Akuntansi Akruwal * Pengalaman Menjalankan Basis Kas to Akruwal	(Combined)	5.957	17	.350	3.494	.016
	Between Groups	3.133	1	3.133	31.239	.000
	Deviation from Linearity	2.825	16	.177	1.760	.163
	Within Groups	1.203	12	.100		
	Total	7.161	29			

Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig F pada deviation from linierity 0,163 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan akuntansi akruwal dengan pengalaman menjalankan basis kas bersifat linier.

4.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara hubungan yang sempurna antara variable-variabel independen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut :

Tabel 4.19

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.714	.499		1.432	.164		
	Tingkat Pendidikan Staf	.294	.091	.401	3.218	.003	.969	1.032
	Pengalaman Menjalankan Basis Kas	.569	.120	.591	4.744	.000	.969	1.032

a. Dependent Variable: Penerapan Akuntansi Akruwal

Variabel dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF sebesar $1,032 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.4 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut :

Tabel 4.20

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.165	2	.082	1.995	.156 ^b
	Residual	1.116	27	.041		
	Total	1.281	29			

a. Dependent Variable: Abs_RES1

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Menjalankan Basis Kas, Tingkat Pendidikan Staf

Tabel 4.21

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.741	.309		2.401	.024
	Tingkat Pendidikan Staf	.005	.057	.015	.083	.934
	Pengalaman Menjalankan Basis Kas	-.147	.074	-.361	-1.979	.058

a. Dependent Variable: Abs_RES1

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung yang ditemukan sebesar 0,083 dan -1,979 dengan sig 0,934 dan 0,058. Oleh karena nilai sig $> 0,05$ maka dapat disimpulkan untuk persamaan tingkat pendidikan staf dan pengalaman menjalankan basis kas tidak terjadi heterokedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan (X1) dan pengalaman menjalankan basis kas menuju Akrual (X2) terhadap penerapan Akuntansi Akrual (Y). Pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terhadap penerapan akuntansi akrual diuji dengan regresi linier berganda. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut :

Tabel 4.22

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengalaman Menjalankan Basis Kas, Tingkat Pendidikan Staf ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Penerapan Akuntansi Akrual

b. All requested variables entered.

Tabel 4.23

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.563	.32838

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Menjalankan Basis Kas, Tingkat Pendidikan Staf

- R = 0,770 artinya koefisien korelasinya sebesar 0,770. Angka menunjukkan derajat korelasi antara variabel tingkat pendidikan staf keuangan (X1) dan

pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2), dengan penerapan akuntansi akrual (Y).

- R Square = 0,593 menunjukkan angka koefisien determinasinya (R^2). Artinya variansi dalam penerapan akuntansi akrual dapat dijelaskan oleh pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, dan tingkat pendidikan staf keuangan sebesar 59,3%, sisanya 40,7% berasal dari variabel lain. Analisis korelasi ganda berfungsi untuk mencari besarnya hubungan antara dua variabel bebas (X) atau lebih secara simultan (besama-sama) dengan variabel terikat (Y).

Tabel 4.24

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.249	2	2.125	19.702	.000 ^b
	Residual	2.912	27	.108		
	Total	7.161	29			

a. Dependent Variable: Penerapan Akuntansi Akrual

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Menjalankan Basis Kas menuju Akrual, Tingkat Pendidikan Staf Keuangan

- Bagian ini menampilkan hasil pengujian koefisien determinasi. Hasil pengujian tersebut ditemukan nilai F hitung sebesar 19,702 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya secara simultan tingkat pendidikan staf keuangan (X1), dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual (Y).
- Semakin tinggi tingkat pendidikan staf keuangan maka dalam penerapan akuntansi akrual dapat lebih mudah untuk dilaksanakan, begitu pula dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual. Pegawai yang sebelumnya

sudah pernah melaksanakan basis kas menuju akrual lebih cepat untuk melakukan penyesuaian dengan akuntansi berbasis akrual.

Tabel 4.25

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.714	.499		1.432	.164
1 Tingkat Pendidikan Staf	.294	.091	.401	3.218	.003
Pengalaman Menjalankan Basis Kas	.569	.120	.591	4.744	.000

a. Dependent Variable: Penerapan Akuntansi Akrual

➤ Persamaan garis regresi: $Y = 0,714 + 0,294 X_1 + 0,569 X_2$

a. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan sig. 0,003.

Oleh karena nilai sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya tingkat pendidikan staf keuangan (X_1) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Berpengaruh positif artinya jika tingkat pendidikan staf naik, maka penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika tingkat pendidikan staf turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.

Uji t dimaksudkan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen (Penerapan Akuntansi Akrual). Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual dipengaruhi oleh tingkat pendidikan staf keuangan. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui hasil nilai

korelasi determinan antara tingkat pendidikan staf (X1) terhadap penerapan akuntansi akrual (Y) sebesar 0,294, dan memiliki nilai peluang sig sebesar 0,000.

Gambaran umum tingkat pendidikan staf keuangan di BKAD Pemerintah Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan rata-rata lulusan Sarjana strata 1 (S1). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan staf keuangan maka proses penerapan akuntansi akrual di harapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik.

- b. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Berpengaruh positif artinya jika pengalaman menjalankan basis kas naik, maka penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika pengalaman menjalankan basis kas turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual dipengaruhi oleh pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui hasil nilai korelasi determinan antara pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2)

terhadap penerapan akuntansi akrual (Y) sebesar 0,569, dan memiliki nilai peluang sig sebesar 0,000.

Dari data yang diperoleh sebesar 40,00% responden memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Menurut Christiaens, (1999) organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tingkat pendidikan staf keuangan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan staf sebesar 59,3% dapat dijelaskan. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan sig. 0,003. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya tingkat pendidikan staf keuangan (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y).
- b. Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya pengalaman menjalankan basis kas (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Berpengaruh positif artinya jika pengalaman menjalankan basis kas naik, maka penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika pengalaman menjalankan basis kas turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, antara lain :

- a. Diharapkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan tentang basis akrual sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan dan mendukung reformasi dibidang akuntansi akrual pemerintah yang akuntabel dan informatif.

STIE Widya Wivaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2001), *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hafiz, Abdul Tanjung (2015), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*, Cetakan pertama, Bandung : Alfabeta
- Halim, Abdul (2002), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi,(2016), *Teori, Konsep dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan kedua, Jakarta: Salemba Empat
- Hetti Herlina (2013), “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010”, Skripsi, Universitas Negeri Padang
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke-4, Yogyakarta: CV Andi
- Nazir, Moh (2014), *Metode Penelitian*, cet.10, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010), *Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual)*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun (2005), *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006), *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2013), *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*, cet.4, Bandung: Alfabeta

Sigit, Soehardi (2001), *Metodologi Penelitian*, cet.2, Yogyakarta: BPFE UST

Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*, Cetakan ke-22, Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2008), *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), *Pemerintahan Daerah*

<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html>

<http://sbm.binus.ac.id/2015/11/20/uji-asumsi-klasik-uji-multikolinearitas/>

<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-homogenitas.html>

<https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html>

STIE Widyawidya
Jangan Plagiat